

JURNAL

**PEMENUHAN HAK NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN WIROGUNAN
UNTUK MENDAPATKAN PENGURANGAN MASA PIDANA (REMISI)**



Diajukan Oleh :

Reymon Axel Amalo

NPM : 100510399

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan Pidana

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

2016

HALAMAN PENGESAHAN

JURNAL SKRIPSI

PEMENUHAN HAK NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN WIROGUNAN
UNTUK MENDAPATKAN PENGURANGAN MASA PIDANA (REMISI)



Diajukan Oleh :

Reymon Axel Amalo

NPM : 100510399

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan Pidana

Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Paulinus Soge, S.H., M.Hum.

Mengesahkan



Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atmajaya Yogyakarta

**FAKULTAS
HUKUM**

Dr. Endro Susilo, S.H., LL.m.

**PEMENUHAN HAK NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN WIROGUNAN
UNTUK MENDAPATKAN PENGURANGAN MASA PIDANA (REMISI)**

Reymon Axel Amalo,

Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta

Email: reymon.amalo@yahoo.co.id

ABSTRACT

This research aims to find out about the implementation of remission to corruption convicts in prisons Wirogunan, Remission is a reduction in criminal past for convicts. corruption convicts have the rights to be given remission. Based on research in prison wirogunan implementation of remission to corruption convicts in prison Wirogunan has been running effectively in accordance with the law. This research uses normative research methods, normative research methods is research that focuses on the norms of positive law in the form of legislation. Data collections by interviews and legal facts.

(Keywords: remission, corruption convicts, rights, prison.)

1. PENDAHULUAN

Sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menegaskan bahwa Sistem Pemasyarakatan bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik dan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang

terkandung dalam Pancasila. Sistem Pemasyarakatan menitikberatkan pada usaha perawatan, pembinaan, pendidikan, dan bimbingan bagi warga binaan yang bertujuan untuk memulihkan kesatuan hubungan yang asasi antara individu warga binaan dan masyarakat. Pelaksanaan pembinaan pemasyarakatan didasarkan atas prinsip-prinsip sistem pemasyarakatan untuk merawat, membina, mendidik dan membimbing warga binaan dengan

tujuan agar menjadi warga yang baik dan berguna.¹

Narapidana memiliki hak-haknya sesuai dengan yang tertulis dalam pasal 14 ayat (1) undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan yang salah satunya yaitu pada huruf I yaitu hak untuk mendapatkan remisi. remisi merupakan hak yang diberikan terhadap narapidana dan anak pidana yang telah berkelakuan baik selama menjalani pidana. Dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Bahkan, dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 disebutkan secara eksplisit bahwa setiap Narapidana dan

Anak Pidana yang selama menjalani masa pidana berkelakuan baik berhak mendapatkan remisi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sejauh apapun perbuatan yang telah dilakukan oleh terpidana, terpidana tersebut tetap dilekati dengan hak untuk mendapatkan remisi. Kita mengetahui bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan hukum yang sama atau lazimnya disebut Equality before the Law yang berarti bahwa terdapat persamaan kedudukan di hadapan hukum dimana setiap orang tidak boleh dikesampingkan hak dan kewajiban, walaupun dia telah melakukan kejahatan. Dalam konteks ini, terpidana korupsi pun memiliki hak untuk mendapatkan remisi. Dalam sistem pemasyarakatan yang dianut oleh Indonesia, tidak ada perbedaan nomenklatur antara terpidana korupsi dengan terpidana tindak pidana lain.²

1

<http://www.hukumonline.com/pusatdata/download/fl9389/node/13297>

2

<https://constituendum.wordpress.com/2016/01/21/pemberian-remisi-bagi-terpidana-korupsi/>

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan 3 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, dikenal jenis-jenis/bentuk Remisi yaitu:

- a. Remisi Umum adalah remisi yang diberikan pada Hari Peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus;
- b. Remisi Khusus adalah remisi yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan, dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan;
- c. Remisi tambahan adalah remisi yang diberikan

apabila narapidana atau Anak Pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana:

- 1) Berbuat jasa kepada negara;
- 2) Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara atau kemanusiaan;
- 3) Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.
- d. Remisi dasawarsa adalah remisi yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana setiap 10 (sepuluh) Tahun sekali pada hari kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus.³

³ Dwijda Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 97.

2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan yaitu, penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer. Metode pengumpulan data sekunder dalam penulisan ini, penulis menggunakan cara studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan analisis data dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan, setelah itu diseleksi berdasarkan permasalahan yang dilihat dengan ketentuan peraturan yang berlaku, kemudian disimpulkan sehingga diperoleh jawaban permasalahan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penghuni	Lembaga
Pemasyarakatan bisa narapidana (napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan bisa juga yang statusnya masih tahanan, artinya orang yang masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim atau belum memperoleh putusan pengadilan.	Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa narapidana (napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan bisa juga yang statusnya masih tahanan, artinya orang yang masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim atau belum memperoleh putusan pengadilan.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Desi Afneliza, A.Md. IP, sebagai kepala bagian registrasi di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Yogyakarta, jumlah penghuni lapas menurut perkara pidana, dilakukan penghitungan setiap

bulannya, tepatnya pada akhir bulan. Berikut ini adalah data penghitungan terakhir pada 31 Agustus 2016 di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan:

Jenis perkara	Jumlah penghuni
korupsi	41
Perampokan	44
Penipuan	54
Pembunuhan	35
Perlindungan anak	78
Narkoba	21
Pencucian uang	8
Penggelapan	12
Perjudian	12
Penganiayaan	13
Ketertiban	11
Materai	3
Mata uang	2
Penadahan	3
Penculikan	6
Pencurian	44
Lain-lain	9
TOTAL	396

Jumlah penghuni lepas di lembaga pemasyarakatan wirogunan tiap harinya berbeda di karenakan masuk keluarnya penghuni lepas, sebagai contoh penghitungan di Lembaga

Pemasyarakatan Wirogunan pada tanggal 20 September 2016 berjumlah 452 (empat ratus lima puluh dua) narapidana, yaitu 397 (tiga ratus Sembilan puluh tujuh) terdiri dari 322 (tiga ratus dua puluh dua) laki-laki dan 75 (tujuh puluh lima) perempuan juga tahanan yang berjumlah 55 (lima puluh lima) tahanan terdiri dari 7 (tujuh) laki-laki dan 48 (empat puluh delapan) perempuan.

Adapun alur pemberian remisi kepada narapidana dan anak pidana yaitu, warga binaan pemasyarakatan harus terlebih dahulu telah menjalani pidana penjara minimal 6 (enam) bulan dari masa pidana yang dijatuhkannya. Selain daripada itu warga binaan pemasyarakatan yang bersangkutan harus berkelakuan baik selama menjalani pidana. Setelah itu barulah warga binaan pemasyarakatan tersebut diusulkan remisi oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan yang ditujukan pada kantor wilayah kementerian hukum dan ham. Kemudian

Kementerian Hukum dan Ham akan memberikan remisi setelah mendapat pertimbangan dari Direktur Jendral Pemasyarakatan setelah itu Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang remisi diberitahukan kepada warga binaan pemasyarakatan.

Adapun alur pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi juga sama, yaitu telah menjalani pidana penjara yang dijatuhkan padanya minimal 6 (enam) bulan dan berkelakuan baik, akan tetapi ada tambahan syarat yaitu, narapidana tindak pidana korupsi bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya dan telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 dan Pasal 34A Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan Pasal 1 Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Desi Afneliza, A.Md. IP, sebagai kepala bagian registrasi, dapat diketahui bahwa dari awal tahun 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016, jumlah narapidana tindak pidana korupsi sebanyak 41 (empat puluh satu) orang, yang sudah diberikan remisi sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang, yang terdiri dari 30 (tiga puluh) laki-laki dan 2 (dua) perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan.

Dengan demikian terlihat bahwa dari narapidana tindak pidana korupsi yang berjumlah 41 (empat puluh satu) orang, pada tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 20 September 2016, terdapat 32 (tiga puluh dua) narapidana tindak pidana korupsi yang terdiri dari 30 (tiga puluh) orang laki-laki dan 2

(dua) orang perempuan yang diberikan remisi, sesuai dengan alur pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan, yaitu: telah menjalani pidana penjara selama 6 (enam) bulan dari keseluruhan masa pidana yang dijatuhkan padanya, berkelakuan baik, bersedia bekerja sama dengan pemerintah untuk membongkar kasus tindak pidana yang dilakukannya dan juga membayar ganti kerugian sesuai dengan jumlah yang dijatuhkan pada sesuai dengan keputusan pengadilan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan oleh penulis di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan, maka penulis menyimpulkan bahwa pemenuhan hak narapidana tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan untuk mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi) yaitu pertama-tama narapidana harus menjalani pidana

penjara selama 6 (enam) bulan dari keseluruhan masa pidana yang dijatuhkan padanya, berkelakuan baik, bersedia bekerja sama dengan pemerintah untuk membongkar kasus tindak pidana yang dilakukannya dan juga membayar ganti kerugian sesuai dengan jumlah yang ditentukan sesuai dengan keputusan pengadilan. Setelah itu Kepala Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan mengusulkan pemberian remisi bagi narapidana ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Yogyakarta. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham akan memberikan remisi setelah memperoleh pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

Berdasarkan data yang diperoleh oleh penulis dari awal tahun 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016, jumlah narapidana tindak pidana korupsi sebanyak 41 orang, yang sudah diberikan remisi sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang, yang terdiri dari 30 (tiga puluh) laki-laki

dan 2 (dua) perempuan. Dengan demikian, menurut penulis pemberian remisi sebagaimana yang telah dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan sudah terlaksana sesuai dengan perturan yang berlaku dan hak-hak narapidana khususnya narapidana korupsi sudah terpenuhi.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

Website

<http://www.hukumonline.com/pusatdata/download/fl9389/node/13297>
<https://constituendum.wordpress.com/2016/01/21/pemberian-remisi-bagi-terpidana-korupsi/>

5. REFRENSI

Buku

Dwijda Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.